

**Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi
Pengemis Di Kabupaten Pidie**

TEUKU RAMA ISLAMI

Ilmu Administrasi, Universitas Jabal Ghafur
teukuramaislami@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the extent to which the evaluation of the Social Service Development Program in Reducing Beggars in Pidie Regency. And to find out what factors are obstacles to the Social Service Development Program in Reducing Beggars in Pidie Regency. The theory used in this study is the theory of Policy Implementation and the concept of development, this study uses a qualitative descriptive method, namely the results of the study are described concretely according to the events that occur in the object of research. The results of this study are based on the facts that there are several programs that have been run by the social service in reducing the number of beggars in Pidie Regency, one of these efforts is by working with the Satpol PP in conducting periodic raids on beggars. The formation of qanun by Satpol PP, the qanun aims to legalize the firm actions taken by Satpol PP in an effort to control beggars in Pidie Regency. The shortcomings of the program run by the Social Service, the social service cannot run other programs that are considered capable of reducing the number of beggars in Pidie Regency. There are still many beggars who do not get a deterrent effect from the raids that have been carried out, so this is an obstacle.

Keywords: *Social Services, Development Program, Beggars*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana mengevaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di kabupaten Pidie. Serta untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan dan konsep pembinaan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta bahwa ada beberapa prgoram yang telah dijalankan oleh dinas sosial dalam mengurangi angka pengemis di Kabupaten Pidie, upaya-upaya tersebut adalah salah satunya dengan bekerja sama dengan satpol PP dalam melakukan razia secara berkala terhadap pengemis. Pembentukan qanun oleh satpol pp, qanun tersebut bertujuan untuk melegalkan tindakan tegas yang dilakukan satpol pp dalam upaya penertiban pengemis kabupaten Pidie. Adapun kekurangan dari program yang dijalanannya Dinas Sosial, dinas sosial tidak bisa menjalankan program-program lain yang dinilai mampu mengurangi angka pengemis dikabupaten Pidie. masih banyak pengemis yang tidak mendapatkan efekjera terhadap razia yang telah didapatkan, sehingga hal ini menjadi kendala.

Kata Kunci: *Dinas Sosial , Program Pembinaan, Pengemis*

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup sehari-hari yang sangat tinggi namun tidak seimbang dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari itu salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah pengemis. Tingkat pendidikan yang sangat rendah dibandingkan pada masyarakat umumnya membuat pengemis mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Selain itu para pengemis tidak memiliki keterampilan yang bisa digunakan sebagai bekal untuk iaberwirausaha dan minim sekali untuk mendapatkan pekerjaan yang tingkat Pendidikan yang rendah dibandingkan dengan mereka yang tingkat pendidikanya tinggi.

Kesejahteraan sosial dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.". Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha.

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 223 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penanganan

masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut qanun yang perlu diperhatikan oleh dinas sosial yaitu:

1. Anak yang belum sampai usia 18 tahun
2. Orang tua lansia (lanjut usia) yang sudah mencapai 60 tahun tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materil, spiritual maupun social
3. Penyandang Disabilitas yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.
4. Penderita penyakit kronis yang menderita penyakit menahun atau kronis seperti kusta, Tuberculosis (TBC) paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali, termasuk penderita HIV/AIDS dan stroke tapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/ wajar.
5. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tidak tetap dan layak atau mereka sering berpindah- pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliaran di dalam kota dan makan minum di sembarang tempat.
6. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum

atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain

Ada beberapa faktor penyebab gelandangan dan pengemis sbb.:

1. Faktor Ekonomi; Kemiskinan menjadi salah satu pemicu terjadinya sebuah kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, Kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang secara finansial.
2. Faktor lingkungan keluarga; Permasalahan ini bisa diakibatkan karena ketidakcocokan atau sering dibilang tidak ada komunikasi antara keluarga dengan anggota.
3. Faktor Pendidikan: Muncul pengemis juga diakibatkan oleh masalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya bergantung pada ego pribadi tanpa mempedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain.
4. Faktor sosial dan budaya: Pengemis yang berasal dari lingkungan kehidupan yang tidak teratur dan cenderung tidak pernah melakukan pekerjaan apapun dan memiliki sifat malas akan pekerjaan untuk kebutuhannya sehari-hari bahkan mereka lebih memilih menjadi pengemis dengan mendapatkan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian atau keterampilan yang khusus untuk berkerja.
5. Faktor lapangan pekerjaan kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka persaingan dalam dunia pekerjaan yang kemudian beberapa diantaranya mengambil jalan pintas, hal ini didukung dengan

tidak memiliki modal usaha, tidak mempunyai keterampilan, dan didukung dengan kenyamanan yang diperoleh dari mengemis.

Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah di Aceh dengan angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah 89,53 jiwa masyarakat miskin. Tahun 2023 jumlah kemiskinan di Kabupaten Pidie mengalami peningkatan menjadi 86,79 jiwa. Hal tersebut memicu adanya pengemis, peningkatan jumlah penduduk miskin di Pidie menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah secara khusus. Dari hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, jumlah pengemis menjadi semakin mengalami kenaikan, ketidakhadiran pemerintah kabupaten Pidie dalam menertipkan pemengemis terutama pada simpang 5 (simpang aneuk mulieng) menjadi faktor utama pengemis lebih leluasa dalam melakukan tindakannya. Sejauh tahun 2023-2024 ini peneliti tidak melihat adanya razia rutin yang dilaksanakan oleh pihak terkait.

Dengan berkembangnya pengemis maka dikhawatirkan akan memberi peluang kepada pengemis sehingga munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, serta berpeluang terjadinya aksi kriminal, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, Padahal di sisi lain mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada dinas sosial Kabupaten Pidie, masyarakat Pidie, serta pengemis yang berada di wilayah Pidie. Adapun dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sample dalam penelitian, metode pengambilan sumber data, peneliti memilih subjek berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti melalui Data primer yang merupakan observasi, dan wawancara dan data sekunder yaitu dokumen, arsip, evaluasi, laporan, dan buku ilmiah

Adapun analisis yang dilakukan peneliti diawali dengan mempelajari dan menganalisis semua sumber yang telah ditemukan, termasuk dokumentasi dan hasil wawancara secara acak. Data yang belum teranalisis dikumpulkan kembali, kemudian melalui proses pemeriksaan ulang serta diproses kembali. Secara keseluruhan data yang telah terkumpul dicatat secara objektif sesuai dengan temuan dari hasil penelitian dan observasi lapangan.

3. PEMBAHASAN

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023–2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPA Aceh 2023-2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Pejabat Kepala Daerah Pemerintah

Aceh periode 2023-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan Dinas Sosial Aceh untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

Dinas sosial sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, Pekerjaan Sosial merupakan dinas di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sebagai salah satu satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPA Aceh 2023-2026 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Pejabat Kepala Daerah Pemerintah Aceh periode 2023-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan Dinas Sosial Aceh untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Tujuan Global (*Global Goals*) dari SDGs tersebut yaitu:

1. Tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta

- mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
 4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
 5. Kesetaraan. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
 6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
 7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
 8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
 9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
 10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
 11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
 12. Konsumsi dan produksi bertanggungjawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
 13. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
 14. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
 15. Kehidupan didarat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
 16. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Dalam upaya menangani kasus pengemis tersebut pemerintahan dalam hal ini dinas sosial kabupaten Pidie telah melaksanakan beberapa program kerja pemerintah untuk mengurangi angka peningkatan pengemis. Pemerintah bekerja sama dengan satpol PP dalam upaya pengurangan pengemis tersebut. beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah dengan rutin melakukan penertiban. penertiban dilakukan secara berkala. Kemudian pengemis tersebut kemudian dibawa ke dinas sosial, dalam hal ini upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan adanya pembinaan, para pengemis yang terjaring razia dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan terhadap mereka. Pembinaan dilakukan dalam upaya pemerintah mengurangi pengemis.

Namun beberapa sebagian dari mereka mendapat respon yang positif dan menerima efek jera sehingga sebagian dari mereka lebih mudah dalam melakukan pembinaan. Namun ada beberapa dari pengemis tersebut sudah terbiasa dan sudah menjadikan mengemis tersebut sebagai mata pencaharian mereka. Beberapa dari mereka tersebut yang sangat sulit kita bina dan kita tertibkan. Beberapa tindakan tegas telah kita sampaikan untuk memberikan peringatan terhadap mereka.

Dalam penjelasannya pihak dinas sosial memberikan penjelasan tentang adanya qanun satpol pp yang bertujuan menjadi acuan legalitas untuk satpol pp, qanun tersebut dilakukan dalam upaya legalitas tindakan tegas yang akan dijalankan oleh satpol PP dalam

menertibkan pengemis, adapun isi dari qanun tersebut berupa pelarangan pengemis di seputaran persimpangan dan lampu merah yang berada di Kabupaten Pidie.

Ada beberapa rencana dinas sosial yang ingin dijalankan, beberapa rencana tersebut dinilai mampu mengurangi angka pengemis di jalanan dan dinilai meningkatkan ekonomi kreatifitas di kabupaten Pidie. Namun rencana tersebut masih belum terealisasi, kendala anggaran dinas sosial menjadi alasan pertama belum terlaksanakannya rencana tersebut. kegiatan yang ingin dijalankan tersebut merupakan suatu bentuk pelatihan pemberian materi tentang keterampilan tangan, keterampilan ini diharapkan mampu menjadi mata pencaharian.

No	Jenis Layanan	Keterangan
1.	Razia Rutin	Merupakan program rutin dalam rangka mengurangi pengemis
2.	Pembinaan	Meningkatkan pemahaman pengemistentang efek negatif dari mengemis
3.	Qanun Satpol PP	Upaya tindakan untuk melegalkanTindakan tegas yang akan disampaikan oleh satpol PP terhadap pengemis

Adapun beberapa tanggapan masyarakat yang berbeda-beda mengenai pengemis di Kabupaten Pidie. Ismail selaku masyarakat yang berkegiatan diwarung kopi menjelaskan, keberadaan pengemis dan pengamen di arena warung kopi dan tempat keramaian sudah sangat meresahkan masyarakat. keberadaan mereka sudah sangat menjadi suatu permasalahan dalam lingkungan sosial. Ketidak patuhan dan kesewenang-wenangan pengemis serta pemerintah dalam hal ini dinas sosial serta satpol pp yang dinilai tidak menjalankan tugas secara maksimal. Menjadi faktor utama

peningkatan jumlah pengemis di warung-warung kopi dan tempat keramaian.

Dari narasumber mengatakan, peningkatan jumlah pengemis di Kabupaten Pidie tidak terlalu signifikan. Namun peningkatan jumlah tersebut menjadi penilaian masyarakat terhadap sistem kinerja pemerintah dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu mengurangi jumlah pengemis serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Rizki fenomena jumlah pengemis yang semakin meningkat tidak hanya didasari oleh peningkatan jumlah pengemis. Namun keberanian dan keberadaan pengemis yang telah berani memasuki arena warung kopi dan tempat-tempat keramaian. Sehingga keberadaan para pengemis tersebut telah menjadi sorotan dan konsumsi publik di wilayah Kabupaten Pidie.

Masyarakat merupakan elemen utama dalam berkehidupan sosial, kesenjangan yang terjadi akibat dari adanya peningkatan pengemis menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, penurunan jumlah pengemis dan meratakan kesejahteraan masyarakat menjadi salah tugas dan tanggungjawab pemerintah. faktor yang menjelaskan tingkat kemakmuran dan kemajuan suatu wilayah. Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh tindakan pengemis yang dinilai agresif oleh masyarakat menjadi tantangan yang perlu perhatian lebih dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara, Ismail mengatakan keresahan menjadi semakin meningkat disebabkan oleh arogansi pengemis, tindakan mereka yang memaksa diberikan sumbangan. Selain dari keresahan, Ismail menambahkan merasakan rasa kekhawatiran terhadap anak-anak yang ikut serta dalam mengemis, aktivitas yang dijalankan

sampai tengah malam menjadi rasa peduli oleh masyarakat akan keselamatan dan kenyamanan anak tersebut.

Tindakan pengemis dan pengamen yang telah berani mengganggu kenyamanan dan telah menjadi keresahan masyarakat tidak menjadi kesalahan pengemis, namun neresumber mempertanyakan program-program pihak yang berwenang dalam menertibkan dan memberdayakan para pengemis tersebut. narasumber mengatakan permasalahan pengemis telah memiliki pihak yang berwenang dalam mengatasi hal tersebut, peningkatan dan keresahan yang ditimbulkan para pengemis menjadi suatu tolek ukur program pemerintah yang tidak efektif. Pengemis merupakan masyarakat yang masuk dalam salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Peningkatan jumlah Pengemis disebabkan oleh kurangnya bentuk perhatian pemerintah, keberadaan pengemis didasari oleh beberapa faktor. Beberapa faktor penyebab peningkatan jumlah pengemis adalah pertama: ekonomi, kedua: social, ketiga: lingkungan keempat: kurangnya bentuk perhatian pemerintah. Pengemis telah menjadi salah satu lahan atau tempat yang dijadikan sebagai tempat mata pencaharian, pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak seimbang merupakan permasalahan utama, sehingga beberapa masyarakat mengambil jalan pintas serta cepat dengan meminta-minta (mengemis)

Keadaan tersebut menjadi semakin meningkat dengan kurangnya perhatian pemerintah, ini dikarenakan dalam hal penertiban oleh pemerintah tidak memiliki wewenang dalam aturan secara khusus, sehingga masyarakat yang telah menjadikan mengemis sebagai tempat mata pencaharian menjadi semakin semen- mena dan tidak

beraturan. kebutuhan ekonomi menjadi penyebab utama Dahri terjun di jalan dan meminta-minta, tanggungan yang berat serta tidak adanya perhatian suami terhadap nafkah serta bantuan Desa yang tidak mencukupi menjadi alasan utama berada di jalan dan diwarung-warung.

Pada sesi wawancara bersama dengan narasumber terakhir terhadap pengemis, kebutuhan hidup merupakan permasalahan utama yang menjadikan setiap masyarakat menjadikan mengemis sebagai jalan utama dalam menyelesaikan masalah keuangan. Namun ketegasan pemerintah dalam mengelola permasalahan pada masyarakat menjadi hal utama terhadap penyelesaian pengemis di Kabupaten Pidie. Peneliti melihat pengemis yang telah diwawancarai merasa telah nyaman pada dunia meminta-minta tersebut. Penghasilan yang didapatkan dari mengemis serta kemudahan yang diperoleh telah membentuk suatu pola yang mudah dalam mencari nafkah. Sehingga kenyamanan yang diperoleh membuat pengemis betah dan semakin meningkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu penelitian tentang Evaluasi program pembinaan Dinas Sosial dalam mengurangi pengemis di kabupaten Pidie. Sebagai jawaban Bagaimana Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie, dan Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Pengemis di Kabupaten Pidie Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

Faktor yang menjadi penghambat dinas sosial kabupaten pidie dalam menertibkan pengemis adalah, anggaran yang minim sehingga dinas sosial tidak

mampu menjalankan program yang lebih efisien. Kekurangan anggaran tersebut menjadi masalah awal dinas sosial sehingga dinas sosial hanya mampu bergerak sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Pola pikir pengemis yang telah menjadikan mengemis sebagai ladang tempat mata pencaharian, kenyamanan yang diperoleh pengemis, dan kecukupan hasil dari mengemis menjadi pemicu pengemis melakukan tindakan tersebut. Kekebalan terhadap penertiban dan tindakan tegas yang dilakukan dinilai tidak memiliki efek jera terhadap beberapa Pengemis

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya Anggara, 2018, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia: Bandung
- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press : Semarang
- Bastian Bustami & Nurlela. (2006). *Akuntansi Biaya : Kajian Teori dan Aplikasi*.
- Hayat, 2018, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Intrans Publishing : Malang
- Huda, Miftahul, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Mardalis, 2014, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara : Jakarta
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pramono, J. (2020). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.)). Surakarta: UNISRI Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

- Bandung: Alfabeta.
- Prasetyowati, M. I. dan Wcaksana, Arya. (2013) "Implementasi Algoritma Dynamic Programming untuk Multiple Constraints Knapsack Problem". Skripsi. Tangerang: Fakultas Teknik Universitas Multimedia Nusantara.
- Anggara Sahya Anggara, 2018 Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia : Bandung Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science. Erutan Agas Punu Anto, 2017, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3,
- Lukas S. Musianto, (2014) "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian", Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship), 4.2
- Muhamad Jupri (2014) Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Tidung, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol . 2 No. (2)
- Ardiyuanda, A dan Husni Teja Sukmana dan Arief (2008), implementasi 0-1 knapsack menggunakan *algoritma Dynamic programming* pada aplikasi perhitungan Harga satuan produk percetakan berbasis web (studi kasus: cv tunas utama). Jurnal InforSAINS Vol 2, No. 3

Nopember 2008, ISSN 1412-9116.

